

PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN TANI BERBASIS KELEMBAGAAN

*Bambang Susilo*¹

Pemerhati masalah perempuan

¹Email: bambangsusilo@gmail.com

Article History

Submitted:

28-07-2010

Reviewed:

24-12-2010

Approved:

25-12-2010

Abstract: Institutional become an empowerment approach pattern lately has been able to lift the poor to be empowered and grow. Communities are organized in a container group (institution), and the group became a learning medium multifunction members at the exchange of information, knowledge, attitude and even to overcome the problem with both economic and social problems. Slowly, the power of individuals will come into force group and that's where the ongoing process of strengthening and empowerment.

Kata Kunci: Perempuan, Ekonomi, Kelembagaan dan Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Perempuan adalah potensi keluarga yang memiliki semangat namun tak berdaya sehingga perlu diberdayakan. Salah satu penyebab ketidakberdayaan perempuan adalah tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga, pemberdayaan perempuan antara lain dapat dilakukan dengan memberi motivasi, pola pendampingan usaha, pelatihan ketrampilan, penyuluhan kewirausahaan membekali perempuan agar dapat bekerja, berusaha dan dapat memiliki penghasilan. Perempuan dalam kelompok usaha menurut Chambers (1987) memiliki misi utama untuk mengembangkan kemandirian, keswadayaan masyarakat terhadap sumber daya internal lingkungan yang tersedia agar terhindar dari ketidaktahuan, kemiskinan, keterbelakangan, kelemahan fisik, kerentanan ke dalam perangkap kemiskinan, yang mematickan peluang hidup masyarakat miskin.

Pemberdayaan perempuan sangat penting karena merekalah yang umumnya belum mendapatkan kesempatan. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat berfungsi sebagai subyek maupun obyek dalam berbagai aspek pembangunan, baik sebagai perencana, pengambil keputusan, pelaksana, maupun mengevaluasi dan menikmati berbagai hasil pembangunan secara merata. Penelitian tentang pemberdayaan perempuan tani sampai saat ini umumnya lebih fokus

pada hal yang bersifat negatif seperti diskriminasi jenis kelamin, kekerasan pada perempuan, pembatasan kesempatan karier, dll, sementara untuk melihat sisi positifnya masih jarang dilakukan.

Fenomena yang telah diuraikan diatas, mengimplikasikan suatu permasalahan yang sangat penting yaitu pemberdayaan perempuan. Pentingnya masalah pemberdayaan perempuan karena adanya kenyataan bahwa masih banyak perempuan yang belum dapat terberdaya karena berbagai faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat eksternal seperti sosial budaya, kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, faktor geografis dan kecenderungan global seperti politik, ekonomi, teknologi informasi, dll., serta faktor-faktor internal seperti persepsi dan konsep diri perempuan, motivasi, stres kerja, aspirasi pekerjaan dan karakteristik-karakteristik individu lainnya. Karena itu dalam Rakernas Pembangunan Peranan Wanita yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Peranan Wanita tahun 1999 menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu dari lima agenda pokoknya (Kantor Menteri Peranan Wanita, 1999).

Dorongan untuk keluar dari kemiskinan menuntut adanya peran aktif serta tanggung jawab dari seluruh anggota keluarga. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang cukup besar untuk membawa keluarganya keluar dari himpitan ekonomi, sebab selain bekerja pada sektor domestik (dalam rumah tangga) mereka bahkan dituntut pula untuk dapat berperan dalam sektor publik (di luar rumah), misalnya sektor pertanian. Sektor pertanian sebagai wahana pemberdayaan perempuan merupakan pilihan yang tepat. Alasannya, karena Indonesia adalah negara agraris dimana sebagian besar wilayah Indonesia masih memiliki potensi lahan pertanian. Populasi penduduk wanita Indonesia yang cenderung bertambah terus justru dapat dipandang sebagai aset pembangunan serta menjadi modal atau kekuatan pendorong pembangunan nasional. Khusus sektor pertanian menurut Nugroho seperti yang dikutip oleh Nugroho dan Dahuri (2004), proporsi pekerja wanita meningkat sangat signifikan walaupun lebih dengan asumsi bahwa mereka lebih lemah aksesnya terhadap modal, teknologi dan pasar.

Perempuan sudah cukup lama dikenal memiliki peran penting sebagai salah satu tonggak penghasil pangan. Mereka terlibat dalam semua tahap kegiatan, mulai dari pengolahan tanah sampai dengan pemasaran hasil, khususnya pada kegiatan penanaman, penyiangan, panen, pasca panen dan pemasaran. Adanya kemajuan teknologi pertanian yang menciptakan berbagai sarana dan prasarana pertanian (traktor, mesin perontok padi, dll) memang sedikit mengurangi pemakaian tenaga manusia. Namun hal itu belumlah cukup untuk menggantikan peran manusia dalam seluruh tahapan kegiatan sektor pertanian. Belum lagi adanya kenyataan bahwa teknologi tersebut belum sepenuhnya terakses karena berbagai keterbatasannya, misalnya dana

pengadaan, penguasaan teknologi dan sebagainya.

Pemberdayaan perempuan dalam sektor pertanian antara lain nampak dalam bentuk kelompok tani. Tidak setiap kumpulan orang adalah kelompok. Sekumpulan orang disebut kelompok kalau : (1) Saling kenal dan memiliki ikatan bathin satu sama lain, (2) Memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama,

(3) Keanggotaannya relatif stabil untuk jangka waktu yang lama, (4) Ada batas jelas yang membedakan anggota dengan bukan anggota, (5) Ada struktur, yaitu pembagian kewenangan, fungsi, peranan dan tugas yang jelas diantara anggotanya, (6) Ada aturan kelompok yang disepakati dan ditaati oleh para anggotanya, dan (7) Ada kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama (Depdagri, 2003). Kelompok perempuan tani antara lain diharapkan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga agar dicapai kehidupan ekonomi, sosial dan budaya keluarga yang lebih baik dan sejahtera. Kelompok ini diharapkan dapat memacu kegiatan ekonomi produktif di lini terkecil yaitu keluarga.

PEMBAHASAN

A. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata daya. Daya artinya kekuatan. Jadi pemberdayaan adalah penguatan, yaitu penguatan yang lemah (Anonymous, 2004). Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah: (a) penguatan masyarakat yang lemah. Masyarakat yang lemah bukan karena kurus atau sakit, tetapi lemah secara politik, lemah secara ekonomi, dan lemah secara sosial budaya. Jadi, pemberdayaan masyarakat adalah penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta mengandung adanya penguatan moral; (b) pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental dan keterampilan masyarakat.

Pengertian pemberdayaan tersebut sejalan dengan pendapat Priyono dan Pranarka (1996) bahwa pemberdayaan (*empowerment*) mengandung dua pengertian, yaitu *to give power or authority to* dan *to give ability to or enable*. Pengertian pertama, diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Sedangkan pengertian kedua diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Melalui pemberdayaan, masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi **tidak tahu, tidak mau** dan **tidak mampu** menjadi **tahu, mau** dan **mampu**. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu

proses, di mana kekuatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan sangat dominan. Dengan demikian, dimensi pemberdayaan masyarakat menurut YAPPIKA (2004) juga sangat terkait dengan upaya pemberian akses bagi masyarakat, lembaga dan organisasi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

Proses pemberdayaan masyarakat miskin menurut Pranarka dan Moeldjarto (1996), dapat dilakukan secara bertahap dalam tiga fase, yaitu: (1) *fase inisial*, semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, oleh pemerintah dan diperuntukkan bagi rakyat; (2) *fase partisipatoris*, adalah proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat yang sudah dilibatkan secara aktif untuk menuju kemandirian; (3) *fase emansipatif*, adalah proses pemberdayaan dari rakyat dan untuk rakyat dan didukung pemerintah bersama rakyat. Paradigma pemberdayaan tersebut akan mendorong kemampuan pemberdayaan perempuan untuk memperoleh hak-hak ekonomi, sosial dan politik dalam meningkatkan kemandirian perempuan.

Kajian tentang pemberdayaan menurut Browne (1995) diklasifikasikan tiga versi, yaitu: (1) versi tradisional (*traditional*), pemberdayaan difokuskan pada dominasi dan kontrol serta mobilitas ke atas; (2) versi kerja sosial (*the social work*), pemberdayaan dicirikan dalam tiga cara yaitu, pemberdayaan sebagai suatu intervensi dan produk, suatu keterampilan dan suatu proses; dan (3) versi kaum feminis (*feminist*), menurut mereka pemberdayaan berada diantara kedua versi tersebut. Mereka lebih menekankan pada proses liberasi diri sendiri dengan pihak lain, sebagai kekuatan hidup, potensi, kapasitas, pertumbuhan dan energi. Selanjutnya, dalam kajiannya tentang pemberdayaan dalam praktek kerja sosial dengan kaum perempuan usia lanjut, Browne (1995) mengkonsepkan kembali tentang pemberdayaan tersebut. Konsep yang diajukannya adalah berkenaan dengan nilai-nilai ikatan dan keterhubungan, komunitas dan kolektif, serta realitas sosial.

B. Proses, Strategi dan Kendala Pemberdayaan

Proses pemberdayaan menurut Hikmat (2004) mengandung dua kecenderungan. *Pertama*, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya (*survival of the fittes*). Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan atau proses yang pertama tersebut dapat disebut sebagai *kecenderungan primer* dari makna pemberdayaan; *Kedua* atau *kecenderungan sekunder*, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi

pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Pemberdayaan masyarakat menurut Kartasasmita (1996) adalah sebuah strategi. Strategi dimaksud adalah upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakannya. Secara praktis upaya yang merupakan pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat ini akan meningkatkan produktivitas masyarakat itu sendiri, sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam disekitar keberadaan masyarakat dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Dengan demikian masyarakat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Masyarakat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Jadi, dapatlah diartikan bahwa pemberdayaan tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomisnya, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya. Atau dengan kata lain partisipasi masyarakat meningkatkan emansipasi masyarakat.

Berkaitan dengan praktek perubahan sosial, menurut Hikmat (2004) terdapat tiga strategi utamapemberdayaan, yaitu:

1. Strategi tradisional, menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebasdalam berbagai keadaan;
2. Strategi *direct-action*, membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yangterlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi; dan
3. Strategi transformatif, menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkansebelum pengidentifikasian kepentingan diri.

Pemberdayaan masyarakat memiliki tingkatannya sendiri, di mana menurut Suharto (2005) pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra atau tingkatan (*empowerment setting*), yaitu: 1. Aras mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervention*.

2. Aras mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan denganmenggunakan kelompok sebagai media intervensi.
3. Aras makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih

luas.

Jadi, secara sederhana dapat dikatakan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan pada tingkatan individu, kelompok dan tingkatan masyarakat secara umum.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dalam empat bentuk pendekatan, yang menurut Schuftan (1996) terdiri atas:

1. Pelayanan/Jasa (*Service delivery*), karakteristiknya adalah pendekatan pembangunan masyarakat yang menunjuk pada tindakan yang berhubungan secara langsung dengan penyebab utama kegagalan pembangunan;
2. Membangun Kapasitas (*Capacity building*), karakteristiknya adalah pendekatan pembangunan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, kesadaran dan ketrampilan untuk menggunakan kapasitas mereka sendiri dan dari sistem pendukung yang tersedia untuk menanggulangi penyebab yang mendasari kegagalan pembangunan;
3. Advokasi (*Advocacy*), karakteristiknya adalah pendekatan pembangunan masyarakat yang menetapkan proses yang dinamis dalam membangun konsensus dan mandat untuk suatu tindakan dan;
4. Mobilisasi sosial (*Social Mobilization*), karakteristiknya adalah pendekatan pembangunan masyarakat dengan menempatkan orang-orang yang terlibat aktif dalam penilaian-analisis-aksi dari proses pembangunan yang menunjuk pada penyebab lebih mendasar terhadap kegagalan pembangunan dalam usaha untuk meningkatkan keberdayaan mereka.

Sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu, bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara bersama yaitu dalam bidang ekonomi, sosial budaya maupun politik. Hal ini berarti bahwa apabila akan dilakukan suatu upaya pemberdayaan ekonomi, maka harus pula diupayakan pemberdayaan pada bidang lainnya. Pemberdayaan ekonomi menurut Anonimous (2004) tanpa dibarengi dengan pemberdayaan di bidang politik dan sosial budaya, tidak akan ada artinya. Masyarakat yang berdaya secara ekonomi tidak akan dapat dibangun apabila tidak adanya akses bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya, juga apabila sikap mental masyarakat lemah, mudah putus asa, tergantung dan tidak mandiri.

Berkaitan dengan pemberdayaan sebagai usaha untuk perbaikan perekonomian masyarakat miskin, menurut Depdagri (2003) terdapat beberapa usaha atau strategi yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Mendorong secara sistematis proses penyadaran diri secara individual dan kolektif,

2. Mengembangkan organisasi dan kepemimpinan demokratis dalam kelompok sosial primer sebagai media saling belajar dan instrumen perubahan perilaku secara aman,
3. Pendidikan manajemen ekonomi rumah tangga untuk mengembangkan sikap dan perilaku budayapurplus,
4. Mendorong kegiatan usaha produktif dan mobilisasi potensi sumber daya untuk peningkatan pendapatan keluarga,
5. Memfasilitasi dan menjembatani akses pada sumber-sumber pelayanan pengembangan,
6. Penyediaan bantuan teknik dan pendampingan sesuai kebutuhan, dan
7. Memfasilitasi kerjasama antar kelompok dan integrasi dalam kehidupan sosial.

Sedangkan kendala pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengetasan kemiskinannya menurut Latif dan Suryatiningsih seperti yang dikutip oleh Mubyarto (1994), setidaknya terdiri atas tiga hal. Kendala-kendala itu adalah:

- a. Kendala yang bersifat fisik alamiah, adalah rintangan-rintangan yang bersifat fisik yang sudah terwarisi pada suatu daerah tertentu, seperti keadaan tanah yang kering, berbukit-bukit dan sulit air. Untuk mengatasi masalah seperti ini sesungguhnya relatif mudah, karena yang dibutuhkan adalah teknologi, dan itu berarti dana. Akan tetapi pemberian dana atau teknologi pasti tidak akan menyelesaikan segala-galanya, sebab sebelum dan setelah pemberian dana tentu ada persoalan-persoalan non fisik (sosial dan kultural) yang tidak sederhana “bentuk” dan cara penyelesaiannya. Persoalan-persoalan semacam itulah yang pasti akan muncul dan dapat dikatakan mempunyai sifat-sifat struktural- kultural;
- b. Kendala struktural-kultural, dimensi struktural dari kemiskinan menurut Alfian (1980) diartikan sebagai suasana kemiskinan yang bersumber terutama pada struktur sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat, sedangkan dimensi kultural adalah suasana dan sikap pasrah menerima nasib dari sekelompok masyarakat karena tererat dalam berbagai kekurangan sehingga mereka tampak tidak mempunyai inisiatif, tidak bergairah dan tidak dinamis untuk menerima nasib mereka yang dianggap buruk. Akhirnya dimensi struktural kultural adalah berlakunya hubungan-hubungan sosial dan intraksi sosial yang khas dalam masyarakat yang dapat mengakibatkan berlangsungnya suatu kebiasaan dalam membatasi inisiatif serta semangat masyarakat secara langsung atau tidak langsung juga dapat mengenalkan bentuk-bentuk dan sifat yang mengekalkan bentuk-bentuk dan sifat hubungan sosial serta interaksi yang khas

dalam masyarakat dan;

- c. Kendala sistematis, yaitu berlangsungnya suatu pola (pengontrolan) tertentu terhadap sistem-sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat secara sadar atau tidak sadar akan selalu menguntungkan mereka yang telah berada pada posisi yang menguntungkan. Berlakunya pengontrolan (pengendalian) terhadap sistem-sistem kemasyarakatan itu didukung oleh berlangsungnya kebudayaan tertentu dalam masyarakat. Sikap-sikap konservatif akhirnya muncul dalam masyarakat demi mempertahankan status quo, dan inilah yang menjadi kendala utama pemberdayaan masyarakat (merubah struktur sosial secara mendasar).

C. Pemberdayaan Perempuan

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan perempuan, menurut Moser seperti yang dikutip oleh Prijono dan Pranarka (1996) dipandang perlu adanya strategi pemberdayaan bagi perempuan bukan dalam konteks mendominasi orang lain dengan makna apa yang diperoleh perempuan akan merupakan kehilangan bagi laki-laki, melainkan menempatkan pemberdayaan dalam arti kecakapan atau kemampuan perempuan untuk meningkatkan kemandirian (*self reliance*) dan kekuatan yang ada dalam dirinya (*internal strength*), yang dikenal dengan “*the right determine choices in life and to influence the direction of change, through the ability to gain control over crucial material and non material resources*”. Paralel di atas menurut Molyneux seperti yang dikutip oleh Pranarka dan Prijono (1996), memandang pemberdayaan sebagai kapasitas, kemampuan atau tindakan yang ditujukan pada ketidakberdayaan perempuan.

Perempuan akan berdaya pada saat mereka bertindak pada hal-hal yang sifatnya strategis dan bukan hanya ditujukan pada pemenuhan material, tetapi juga kelompok-kelompok sehingga dapat meningkatkan kehidupan mereka. Melalui media kelompok atau *collective self empowerment* cenderung lebih efektif karena adanya *dialogical encounter* yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran serta solidaritas kelompok. Anggota kelompok akan menumbuhkan identitas seragam dan mengenali kepentingan mereka bersama (Friedmann, 1992). Intinya adalah bahwa strategi pemberdayaan terhadap perempuan tidak hanya berhenti pada tataran pemenuhan kebutuhan praktis namun juga mengarahkan pada kebutuhan strategis (Moser, 1989).

Untuk menganalisis konsep pemberdayaan perempuan, menurut Karl seperti yang dikutip oleh Sukesri (1999) terdapat lima dimensi yang harus dipenuhi. *Pertama*, dimensi kesejahteraan melalui terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, perumahan dan sebagainya sejauh mana dinikmati oleh laki-laki dan perempuan. *Kedua*, dimensi akses misalnya sektor pertanian melalui diperolehnya akses tanah, tenaga kerja,

kredit, informasi dan keterampilan. *Ketiga*, dimensi kesadaran kritis dalam upaya penyadaran adanya kesenjangan jender karena faktor sosial budaya yang sifatnya bisa dirubah. Kesenjangan terjadi karena adanya anggapan bahwa posisi sosial ekonomi perempuan lebih rendah dari laki-laki, sehingga peyadaran berarti penumbuhan sikap kritis. *Keempat*, dimensi partisipasi yang ditunjukkan dengan tidak terwakilinya kelas bawah dalam lembaga-lembaga yang terkesan elit. Upaya pemberdayaan di sini diarahkan pada pengorganisasian prempuan agar dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan dan kepentingan mereka. *Kelima*, dimensi kontrol yang dapat dilihat dari kesenjangan alokasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki disegala bidang. Siapa menguasai alat- alat kerja, tenaga kerja, pembentukan modal dan lain-lain. Pembedayaan di sini diarahkan pada alokasi kekuasaan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Konsep pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan paradigma baru pembangunan yang lebih mengaksentuasikan sifat-sifat “*people centered, participatory improving sustainable*” (Kartasmita, 1996). Walaupun pengertiannya berbeda namun tetap mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk membangun daya, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awarese*) akan potensi yang dimilikinya, serta adanya upaya mengembangkan ke arah yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme pencegahan proses pemikiran lebih lanjut. Konsep ini dikembangkan dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari upaya apa yang antara oleh Friedmann seperti yang dikutip oleh Kartasmita (1996), disebut “*alternative development*” yang menghendaki “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equality*”. Ini berarti perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan domestik lainnya, tetapi sudah aktif berperan diberbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Hal ini dimungkinkan karena adanya persamaan jender, persamaan intergenerasi, ditingkatkannya kehidupan berdemokrasi seiring dengan perkembangan jaman.

Paradigma pemberdayaan perempuan menurut pendekatan yang tidak memposisikan perempuan sebagai obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi harus menempatkan perempuan sebagai subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Dengan pendekatan ini diharapkan akan lahir model-model pembangunan yang lebih partisipatif sehingga kontribusi perempuan tidak cukup hanya “ditandai” dalam bentuk uang, tenaga dan *innatura* lainnya. Melainkan harus menghadirkan unsur inisiatif dan determinasi yang benar-benar tumbuh dari perempuan.

Proses pemberdayaan perempuan memerlukan perencanaan yang tersusun secara

matang dan selanjutnya adalah mobilitas sumberdaya yang diperlukan. Pada dasarnya penerapan demokrasi pada program perempuan sama dengan penerapan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi pada intinya berupa dana (modal), sumberdaya manusia, teknologi dan organisasi atau kelembagaan.

Pemberdayaan perempuan menurut Dzuhayatin (1996), ditunjukkan oleh perluasan jangkauan pilihan terhadap peran yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan perubahan kedudukan yang telah tersedia. Bila dibandingkan dengan laki-laki, kaum perempuan lebih banyak diharapkan pada jaringan-jaringan kekuasaan yang merangkap mereka pada citra baku yang justru menggelisahkan mereka.

D. Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Tani Berbasis Kelembagaan

Setiap masyarakat hidup dalam bentuk dan dikuasai oleh lembaga-lembaga tertentu. Lembaga (*institution*) adalah organisasi atau kaidah-kaidah, baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Lembaga-lembaga dalam masyarakat desa ada yang bersifat asli berasal dari adat kebiasaan yang turun temurun tetapi ada pula yang baru diciptakan baik dari dalam maupun dari luar masyarakat desa. Lembaga-lembaga adat yang penting dalam pertanian misalnya pemilikan tanah, jual beli dan sewa menyewa tanah, bagi hasil, gotong royong, koperasi, arisan dan lain- lain. Lembaga-lembaga ini mempunyai peranan tertentu yang diikuti dengan tertib oleh anggota masyarakat desa, dimana setiap penyimpangan akan disoroti dengan tajam oleh masyarakat (Mubyarto, 1995).

Lembaga-lembaga yang ada dalam sektor pertanian sudah mengalami berbagai zaman. Sehingga banyak lembaga yang sudah lenyap tetapi timbul juga lembaga-lembaga baru yang sesuai dengan iklim pembangunan pertanian. Suatu lembaga yang hidup sekarang, ada yang merupakan suatu lembaga baru tetapi mungkin juga merupakan lembaga yang sudah mengalami perubahan mengikuti kebutuhan masyarakat. Misalnya sewa menyewa tanah dapat diubah menjadi bagi hasil atau sistem penyakapan, pinjam meminjam uang di bawah tangan dilembagakan dalam bentuk Badan Kredit Desa (BKD), dan organisasi baru dapat dibentuk untuk melancarkan usaha tertentu.

Seperti dijelaskan terdahulu, gotong royong merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang ada di sektor pertanian. Semangat kerja sama atau bergotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu demi kepentingan bersama banyak didapati dalam masyarakat pedesaan pada berbagai negara. Kegiatan gotong royong yang demikian mempunyai arti ekonomi penting dan dapat benar-benar membantu mempercepat proses pembangunan pertanian. Menurut Notoatmojo seperti yang

dikutip oleh Mubyarto (1995), gotong royong yang asli di Indonesia sudah mulai ditemukan pada tahun 2000

S.M. sampai kira-kira tahun 1800 pada waktu bangsa-bangsa Eropa mulai datang di Indonesia. Gotong royong perlu dibedakan dari tolong menolong atau bantu membantu karena yang kedua akhirnya menunjukkan pada pencapaian tujuan perorangan. Gotong royong adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama misalnya memperbaiki jalan, membuat jembatan, memperbaiki saluran irigasi dan sebagainya.

Semangat gotong royong tersebut juga adalah salah satu hal yang dapat ditemui dalam kelompok tani. Suatu kelompok menurut Turang (1989) setidaknya memiliki beberapa azas yaitu: *kekeluargaan*, yang berkenaan dengan jiwa dan semangat keakraban yang hangat, rasa dan perbuatan sepenanggungan yang tinggi, tolong menolong yang murni antar anggota; *musyawarah dan mufakat*, adalah berkenaan dengan selalu berpegang pada prinsip dan saling pengertian, saling dengar pendapat, saling percaya mempercayai antar anggota, dan menghargai serta menjunjung harkat dan martabat pribadi; *kerja sama*, adalah berkenaan dengan kepentingan bersama dalam suatu kesatuan dan kepentingan perorangan anggota kelompok; *religius*, adalah berkenaan dengan keyakinan atau kepercayaan antar anggota, berdasarkan agama yang diyakini; *persatuan dan kesatuan*, adalah berkenaan dengan adanya kemauan baik untuk bersatu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama, sehingga menjadi satu kesatuan kerja. Selanjutnya, dinamika kelompok tani setidaknya ditandai dengan berbagai aspek di antaranya adalah aspek interaksi sosial.

Kebutuhan manusia sangat kompleks dan beragam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak akan bisa terwujud tanpa adanya bantuan dan kerjasama di antara sesama anggota masyarakat.

Oleh karenanya, realitas menunjukkan bahwa kerjasama baik berupa gotong royong dan tolong menolong menjadi ciri khas penentu interaksi dan relasi sosial dalam mencapai kesejahteraan hidup. Dengan bermodalkan akal dan budi pekerti yang melebihi manusia dengan makhluk lainnya, maka manusia menjadi sentral perubah dan penentu lingkungannya.

Keunikan manusia yang dicirikan melalui akal dan pikirannya menurut Giddens seperti yang dikutip oleh Poloma (1994), menyebabkan setiap individu secara bebas dipandu oleh alam pikirannya dalam bereaksi dan mencapai semua yang menjadi kehendaknya, akan tetapi dalam mencapai kehendaknya diikat oleh aturan moral interaksi sosial yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Mengacu pada apa yang dikemukakan oleh Giddens di atas, maka sudah sewajarnya manusia ditempatkan sebagai aktor penentu

arah dan tujuan interaksi dan relasi yang dibangunnya. Suatu pencapaian tujuan tentu akan sangat sulit dicapai tanpa adanya kerjasama di antara para anggota masyarakat itu.

Interaksi sosial dalam kelompok tani antara lain dapat tergambar dalam beberapa prinsip yaitu: (1) *tolong menolong*, dimaksudkan bukan hanya dalam arti yang mempunyai kelebihan harus membantu yang berkekurangan, tetapi lebih dari itu yakni berupa menghimpun tenaga-tenaga, dana lebih, atau bahan lebih dari para anggota dan diberikan kepada anggota yang memerlukan sehingga yang bersangkutan mampu membangun sesuatu atau mampu mengatasi kesulitan dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.;

(2) *keterbukaan*, adalah berkenaan dengan keterbukaan dalam pengaturan dan pengurusan kegiatan kelompok, keterbukaan hati setiap anggota dalam menyatakan keinginan, kesulitan atau hal-hal yang dirasakan dan keterbukaan dalam menerima anggota baru yang mau menjadi anggota tanpa melihat perbedaan; (3) *disiplin kelompok*, adalah berkenaan dengan perilaku ikhlas dan sukarela serta taat terhadap kaidah-kaidah disiplin kelompok; (4) *kebersamaan*, adalah berkenaan dengan aktualisasi rasa memiliki dari setiap anggota yang menjadikan mereka mudah dan spontan untuk turut serta dalam setiap kegiatan kelompok; (5) *daya guna dan hasil guna*, adalah didasarkan pada mengutamakan hasil maksimal dengan menghimpun atau memanfaatkan tenaga perorangan dan dana atau bahan yang lebih, milik masing-masing anggota kelompok (Turang, 1989).

Kelompok tani merupakan salah satu wadah untuk memberdayakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Jamasy (2004) yang mengatakan bahwa media kelompok merupakan satu pola pendekatan pemberdayaan yang belakangan ini mampu mengangkat mereka yang miskin agar menjadi berdaya dan berkembang. Masyarakat diorganisir dalam wadah kelompok, dan kelompok itu dimultifungsikan menjadi media pembelajaran anggota sekaligus proses tukar menukar informasi, pengetahuan dan sikap. Secara perlahan, kekuatan individu akan muncul menjadi kekuatan kelompok dan di situlah berlangsungnya proses penguatan dan pemberdayaan.

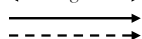
Untuk lebih jelasnya, alur pemberdayaan perempuan petani melalui pendekatan kelompok dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut.

Gambar 1.1



Keterangan:

Garis Keterpaduan
Garis Program
Garis Tujuan



Peran kelompok dalam hal ini menurut Mudiyono *et al.* (2005) setidaknya disebabkan oleh tiga alasan, yaitu:

1. Banyak permasalahan pembangunan di bidang pertanian, kesehatan, pendidikan dan kelembagaan lainnya, yang tidak memungkinkan dipecahkan dengan pengambilan keputusan secara perorangan. Seringkali permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat tidak hanya berada pada *level* individual saja tetapi permasalahan tersebut seringkali juga dirasakan bersama-sama. Maka seringkali pemecahan masalah dan pengambilan keputusan juga membutuhkan keputusan kolektif dengan mengambil kelompok-kelompok sasaran yang ada dalam masyarakat.
2. Proses pemberdayaan sebenarnya memang dapat dilakukan secara individual maupun secara kolektif(kelompok).
3. Kelompok menjadi suatu kekuatan yang berpartisipasi manakala secara individual orang-perorang mengalami kendala untuk berpartisipasi, antara lain kurangnya akses informasi, keterbatasan mendapat kepercayaan dari berbagai pihak, keterbatasan dalam membangun kemitraan maupun untuk mendapatkan jaringan. Karena itu pembentukan kelompok menjadi alternatif bagi mereka untuk dapat mengakses program-program pembangunan.

Berkaitan dengan keberadaan dan aktivitas kelompok tani, terdapat beberapa hal yang sering dijumpai. Hal-hal tersebut antara lain pembagian kerja, pengaturan jam kerja serta sistem pengupahan antara perempuan dan laki-laki yang menjadi anggota kelompok tani. Pembagian kerja secara seksual menurut Budiman (1985), didasari atas beberapa teori yaitu:

1. Teori Nature dan Nurture. Teori nature (alam) beranggapan bahwa perbedaan

psikologis antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh faktor-faktor biologis kedua insan ini. Implikasi teori alam dalam kehidupan dunia kerja adalah pembagian kerja secara seksual. Hal ini berarti secara biologis bidang kerja perempuan dan laki-laki berbeda menurut genetisnya. Sebaliknya teori nurture (kebudayaan) beranggapan bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki tercipta melalui proses belajar dari lingkungan. Implikasi teori kebudayaan dalam kehidupan dunia kerja adalah pembagian kerja yang direkayasa atau dibentuk oleh peradaban masyarakat itu sendiri.

2. Teori Psikoanalisis. Teori psikoanalisis berkaitan dengan pembagian kerja yang sangat berhubungan dengan teori natural (alamiah). Akan tetapi teori psikoanalisis lebih menekankan pada segi simbol kejiwaan manusia.
3. Teori Fungsional dan Marxis. Pada dasarnya kedua teori ini mengesahkan bahwa lingkunganlah yang membuat perempuan lemah. Kaum fungsionalis sebenarnya tidak mengembangkan secara khusus tentang perempuan, tetapi mereka lebih membicarakan tentang fungsi perempuan dalam masyarakat atau lebih tepat fungsi perempuan dalam keluarga inti. Teori ini beranggapan bahwa perempuan harus tinggal di dalam lingkungan rumah tangga karena ini merupakan pengaturan yang paling baik dan memberi keuntungan kepada masyarakat secara keseluruhan. Kaum marxis menantang teori fungsionalis karena menurut mereka keserasian dalam masyarakat adalah sesuatu yang terberi secara wajar. Keserasian dalam masyarakat menurut teori marxis bukan merupakan sesuatu yang terberi, tetapi keserasian itu adalah buatan manusia. Konteks ini jelas memberikan keuntungan kepada laki-laki karena kaum laki-laki tetap mempertahankan keserasian yang menghasilkan pembagian pekerjaan secara seksual ini.

Pembagian kerja berdasarkan seksual menurut Budiman (1985) jelas berimplikasi pada pengaturan jam kerja. Bagi perempuan, bekerja di luar rumah yang bukan sebagai pekerjaan utama membuat pengaturan jam kerjanya berbeda dengan laki-laki. Sehingga pada umumnya, jam kerja laki-laki di luar rumah yang sifatnya memberi penghasilan utama bagi keluarga akan lebih besar dibanding jam kerja kaum perempuan yang harus berbagi dengan tugas domestiknya, yaitu pekerjaan rumah tangga. Khusus untuk sektor pertanian, pengaturan kerja antara perempuan dan laki-laki dapat dikatakan berimbang. Hal ini menurut Mubyarto (1995), disebabkan perempuan maupun laki-laki yang terlibat di dalamnya

umumnya menjadikan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utamanya. Keterlibatan perempuan tani dalam sektor pertanian antara lain disebabkan oleh ketersediaan lahan pertanian, minimnya pengetahuan, serta adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan rumah tangganya. Adanya sifat dan kepentingan yang sama atas pekerjaan sebagai petani tersebut, pada akhirnya membuat pengaturan jam kerja antara perempuan dan laki-laki tidak lagi dibedakan. Sistem pembagian kerja dan pengaturan jam kerja antara perempuan dan laki-laki, pada akhirnya mengarah pada sistem pemberian upah.

Hasil penelitian White (1980) menunjukkan bahwa berdasarkan lingkungan kerjanya, tenaga kerja perempuan seringkali masih dianggap sebagai tenaga kerja nomor dua (sekunder) sehingga seringkali berdampak pada diskriminasi pengupahan. Masih sering terjadi diberbagai sektor pekerjaan, upah tenaga kerja perempuan diperlakukan diskriminatif dan tidak sebanding dengan resiko serta beban pekerjaannya. Khusus untuk sektor pertanian, terdapat perbedaan besar upah antara buruh tani perempuan dan laki-laki didasarkan pada kekuatan otot dan tenaga yang dinilai tidak sama, di mana masing-masing menghasilkan produktivitas per jam kerja yang berlainan. Kekuatan laki-laki yang umumnya dua kali lipat dari perempuan menyebabkan upah buruh wanita hanya setengah dari upah laki-laki.

Hanya sebagai penegasan, yang dimaksud dengan petani menurut Kurtz seperti yang dikutip oleh Sajogyo dan Martowijoyo (2005), terdapat 4 dimensi pokok yang diacu dalam beragam kombinasi oleh pakar berbeda-beda dalam upaya mendefinisikan arti “*peasant*” yaitu :

- 1) Definisi petani sebagai “pengolah tanah di pedesaan” (*rural cultivators*). Terbanyak pakar peneliti membatasi diri pada satu dimensi ini, mengabaikan dimensi lain. Mereka berpegang kuat pada teori “pilihan rasional” yang juga berlaku bagi *peasant*, tidak beda dari pelaku ekonomi lain.
- 2) Kecuali pada dimensi pertama pakar antropolog cenderung juga mengacu pada dimensi “komunitas petani”, yang bercirikan perilaku budaya yang jelas, membedakannya dari pola budaya “urban”.
- 3) Pakar pengembang teori “ekonomi moral” masih menambahkan dimensi ketiga yaitu petani yang menghidupi komunitas desa yang ter subordinasi kuat oleh sesuatu kekuasaan luar.
- 4) Pakar pengikut teori Marx mengacu pada tiga dimensi dalam kombinasi berbeda: yaitu “*rural cultivators*”, komunitas ter subordinasi, dan dimensi penguasaan/pemilikan lahan yang diolah petani.

Kembali pada pembahasan pokok, ada beberapa penelitian yang ditemukan terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan petani dalam peningkatan ekonomi keluarga melalui pendekatan kelembagaan ini, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Novita Tresiana (2000), melalui penelitiannya menemukan bahwa upaya yang dilakukan perempuan tani miskin untuk mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga dimanifestasikan dalam penggalangan kekuatan melalui “aksi kolektif” di antara mereka. Aksi kolektif ini berbentuk kumpulan ibu-ibu tani dengan wujud kegiatan berupa lumbung pakeklik (sewa menyewa dan simpan pinjam) dan arisan (arisan minggu paheng, gabah dan lebaran). Melalui aksi kolektif dan pelaksanaan wujud aktivitasnya, diperoleh manfaat berupa: munculnya perasaan saling perihatin, mengeliminir konflik di antara mereka; akan tetapi juga yang lebih penting adalah mereka mempunyai suatu alternatif pilihan hidup utamanya ketika menghadapi masa pakeklik, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, model usaha dan menghadapi hari lebaran. Pilihan hidup lain dalam mendapatkan dana ini diciptakan sendiri secara kolektif oleh ibu-ibu tani untuk menghadapi rentenir melalui penggalangan dana secara terencana dan menabung sedikit demi sedikit di antara mereka. Dengan demikian melalui aksi kolektif, ibu-ibu tani mendapatkan bukan hanya kekuatan ekonomi tetapi juga kekuatan sosial.

Penelitian selanjutnya oleh Mariam Wulur (2001), dalam penelitiannya dinyatakan bahwa partisipasi perempuan tani yang bergabung dalam kelompok tani *Mapalus* untuk pengembangan usaha produktif termasuk cukup intensif. Mereka tidak hanya terlibat dalam aktivitas pengolahan lahan pertanian sampai masa panen, tetapi juga ikut aktif dalam pengelolaan hasil pasca panen. Mengingat kondisi latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka yang relatif masih rendah, partisipasi kaum perempuan tani merupakan suatu prestasi sebagai perwujudan upaya pemberdayaan perempuan dalam menggali dan mengembangkan sumber daya pribadi secara demokratis, serta merupakan proses pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Partisipasi kaum perempuan tani dalam upaya pengembangan usaha produktif mencakup pengolahan lahan pertanian, pengolahan hasil panen agar memiliki nilai lebih secara ekonomi, serta pemasaran hasil pertanian dengan harga yang kompetitif. Dengan ketrampilan pengelolaan hasil panen yang memiliki daya saing di pasaran, penghasil kaum perempuan tani meningkat, yang pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, maupun masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan Doni Rekro Harijani (1999), setelah melakukan penelitian menemukan bahwa perempuan desa Karangsemi semangatnya tinggi untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Segala macam upaya yang ditempuh terutama di bidang usaha sekecil apapun.

Merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya dan kondisi semacam ini sudah membudaya bagi perempuan desa Karangsemi. Kaum laki-lakinya sangat mendukung inisiatif ini karena mereka beranggapan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan desa ini merupakan kegiatan yang positif. Sayangnya perempuan desa Karangsemi belum berani menghargai jerih payahnya sendiri. Mereka selalu mengatakan bahwa aktivitas di sektor ekonomi keluarga hanyalah pencari nafkah tambahan saja. Wadah yang tersedia seperti PKK dengan 10 Program Pokoknya dan P2WKSS-nya belum mampu menampung semangat perempuan desa di sektor ekonomi. Hal ini disebabkan oleh terikatnya keterbatasan program maupun dana yang *top down*, yang sudah dikemas rapi dan berlaku sama untuk seluruh Indonesia, serta belum mampu menjadi mediator antara perempuan desa dan penguasa. Sehingga kepentingan-kepentingan lokal di desa Karangsemi belum terwadahi yang menjadi salah satu penghalang partisipasi perempuan di dalam pembangunan desa di sektor ekonomi. Dengan demikian model yang mewadahi kegiatan perempuan di sektor ekonomi dan menjadikan perempuan berkesempatan sebagai subyek maupun aktor sesuai dengan kebutuhan lokal desa Karangsemi belum ada.

Farida Hydro Foilyani (2002), dari hasil penelitiannya dinyatakan bahwa perempuan desa Samboja Kuala semangatnya tinggi untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Segala macam upaya ditempuh terutama di bidang usaha yang mereka kerjakan hanya dengan mengandalkan tenaga. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah seperti pemberian modal baik secara tetap, atau bergulir belum mampu memberikan perubahan terhadap perempuan sebaliknya hanya akan membuat ketergantungan pada Pemerintah semakin besar, begitu pula program-program bantuan yang akan diperuntukkan bagi perempuan pedesaan di mana terlalu banyak campur tangan Pemerintah sehingga mematikan aspirasi masyarakat khususnya perempuan desa.

Sri Purwanti (2003), menemukan bahwa perempuan miskin keluarga desa bergabung dengan perempuan yang punya usaha ekonomi produktif, berhasil bersama membuat unit kerja menghasilkan usaha sebagai pengusaha dan pengrajin. Anggota kelompok mengetahui proses pengolahan secara **Pelaju** (Petik olah jual untung), **Pemanju** (Petik kemas jual untung), **Pemuja** (Pemasaran usaha jasa) dari usaha yang ditekuni dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa, membuka peluang kerja memperoleh pendapatan, bergerak dalam kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). Melalui proses pemberdayaan ekonomi: dimana *input* perempuan desa bersama elit ekonomi didukung sumber daya alam dan manusia serta lingkungan sosial setempat melakukan *proses*, secara usaha ekonomi produktif yang

dipengaruhi situasi faktor intern dan faktor ekstern, maka *output*-nya usaha ekonomi produktif dilakukan para perempuan desa menghasilkan pendapatan bagi keluarga, bukan pekerjaan sambilan tetapi pekerjaan yang ditekuni dengan ketrampilan. Peningkatan hasil/kuantitas produksi harus diimbangi kualitas produksi berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga, semula keluarga Pra-S menjadi KS-I bahkan KS-II atau KS-III.

Berangkat dari uraian di atas bahwa, pemberdayaan ekonomi perempuan petani melalui pendekatan kelompok menjadi strategi yang sangat efektif dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga mereka. Hal tersebut dibuktikan juga dengan beberapa hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

KESIMPULAN

Setiap masyarakat hidup dalam bentuk dan dikuasai oleh lembaga-lembaga tertentu. Lembaga (*institution*) adalah organisasi atau kaidah-kaidah, baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Lembaga-lembaga dalam masyarakat desa ada yang bersifat asli berasal dari adat kebiasaan yang turun temurun tetapi ada pula yang baru diciptakan baik dari dalam maupun dari luar masyarakat desa. Lembaga-lembaga adat yang penting dalam pertanian misalnya pemilikan tanah, jual beli dan sewa menyewa tanah, bagi hasil, gotong royong, koperasi, arisan dan lain- lain.

Lembaga-lembaga ini mempunyai peranan tertentu yang diikuti dengan tertib oleh anggota masyarakat desa (Petani), dimana setiap penyimpangan akan disoroti dengan tajam oleh masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan petani, peran kelompok sangatlah penting karena, banyak permasalahan pembangunan di bidang pertanian yang tidak memungkinkan dipecahkan dengan pengambilan keputusan secara perorangan. Seringkali permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat tidak hanya berada pada *level* individual saja tetapi permasalahan tersebut seringkali juga dirasakan bersama-sama. Maka seringkali pemecahan masalah dan pengambilan keputusan juga membutuhkan keputusan kolektif dengan mengambil kelompok-kelompok sasaran yang ada dalam masyarakat. Selain itu, kelompok bisa menjadi suatu kekuatan yang berpartisipasi manakala secara individual orang-perorang mengalami kendala untuk berpartisipasi, antara lain kurangnya akses informasi, keterbatasan mendapat kepercayaan dari berbagai pihak, keterbatasan dalam membangun kemitraan maupun untuk mendapatkan jaringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat*, Manual Teknis Pemberdayaan Masyarakat, Seri Pemberdayaan Masyarakat, Kerjasama Bappenas, Departemen Kimpraswil, Depdagri dan JBIC.
- . 2004. *Manual Teknis Pemberdayaan Masyarakat, Pelestarian Program P2D*, Depdagri, Jakarta.
- Arifin, Bustanul. 2001. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia: Telaah Struktur, Kasus, dan Alternatif Strategi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Browne, C.V. 1995. *Empowerment in Social Work Practice with Older Woman*, Social Work Journal (40), 358-364.
- Budiman, A. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Sosiologis Tentang Peran Wanita di dalam Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Chambers, Robert. 1987. *Rural Development Putting the Last First*. Pepep Sudradjat (penterjemah). 1987. *Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang*, LP3ES, Jakarta.
- Conyers, Diana. 1992. *An Introduction to Social Planning in The Third World*, John Wiley & Sons Ltd. Susetiawan (penterjemah). 1992. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Eko, Sutoro (Editor). 2005. *Pemberdayaan Kaum Marginal*, APMD Press, Yogyakarta.
- Foilyani, Farida Hydro. 2002. *Pemberdayaan Perempuan Pedesaan dalam Pembangunan*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Friedmann, J. 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*, Oxford Blacwell, USA.
- Harijani, Doni Rekro. 1999. *Pemberdayaan Wanita Desa dalam Pembangunan*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Hariwijaya dan Triton P.B. 2005. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Tesis*, Tugu Publisher, Yogyakarta.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press, Bandung.
- Mubyarto. 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Pranarka dan Moeldjarto. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment), dalam Pemberdayaan, Konsep Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Purwanti, Sri. 2003. *Pemberdayaan Perempuan dalam Mengentas Kemiskinan Keluarga Desa*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Remi, S.S., dan Prijono Tjiptoherijanto. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, PT. RinekaCipta, Jakarta.
- Rozaki, Abdur et al. 2004. *Memperkuat Kapasitas Desa dalam Membangun Otonomi*, IRE Press, Yogyakarta.
- Saptari, R. dan Brigitte Holzner. 1997. *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial*, Kalyanamitra, Jakarta.
- Susanti, R.D.I. et al. 2003. *Pemberdayaan Petani Perempuan: Dalam Penerapan Sistem Pertanian Lestari*, Penerbit Dioma, Malang.
- Tresiana, Novita. 2000. *Pemberdayaan Petani Wanita Pedesaan*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Wullur, Mariam. 2001. *Pemberdayaan Wanita di Pedesaan*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- YAPPIKA (Editor). 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas*, FIK-ORNOP-Sulsel, Makasar.